

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmat Nadir, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- A.A. Gde Febri Purnama Putra, 2009, *Merentas Perdamaian Dalam Konflik Pilkada Langsung*, Gava Media, Yogyakarta.
- Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dr. J. Kristiadi, 2006, *Pilkada Langsung Problem Dan Prospek*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Prof. H. Rozali Abdullah, S.H, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- TIM IPD, 2009, *Evaluasi Krisis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia*, The Indonesia Power For Democracy (IPD) Anggota IKAPI, Yogyakarta.
- Prof. Dr. J. Kaloh, 2009, *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Prilaku Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Sinar Grafika
- Leo Agustino, 2009, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Irwanto, 2008, *Dinamika Politik Lokal Era Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

http://www.pendukung.com/id/kelembah/pilkada-dan-otoda.htm (diakses pada: 10 mei 2010)

<http://yanuaradityap.blogspot.com/2009/09/makalah-tentang-calon-independen-html> (Diakses :
saptu, 10 mei 2010 pukul 20.35 wib)

<http://komonitasembunpagi.blogspot.com//2008/12/lapoen-pemantauan-pilkada-tegal-dewa.html>
(Diakses : senin, 31 mei 2010 pukul 20.40 wib)

<http://kompas-cetak/0504/30/opini/172103.htm> (Diakses senin 31 mei 2010 pukul 21.00 wib)

<http://www.saniter-indonesia.com/edisi/cetak/opini/gray-area-calon-independen> (Diakses 1 juni

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5 dan Undang-undangan Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah terhadap Pasal calon yang boleh mendaftar sebagai Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah